



Judul : Pembangunan EBT Di Seluruh Daerah: Komisi VII Dorong PLN Gandeng Bumdes
Tanggal : Sabtu, 15 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pembangunan EBT Di Seluruh Daerah Komisi VII Dorong PLN Gandeng Bumdes

KOMISI VII DPR mendorong PT PLN (Persero) mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berbasis energi ramah lingkungan. Komisi bidang Energi DPR menilai, PT PLN dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan EBT, termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menyatakan, pengembangan dan penggunaan EBT yang ramah lingkungan tak dapat dilakukan secara langsung. Namun, harap dia, upaya atau penerapan EBT di sejumlah daerah mulai dikerjakan PLN dengan menggandeng berbagai stakeholder di daerah.

“Memang tidak bisa dilakukan secara langsung, harus bertahap, terutama di daerah Sumatera. Yang memprihatinkan, di Provinsi Riau belum seratus persen masyarakat menikmati energi, khususnya listrik. Padahal, Riau merupakan provinsi yang berpotensi menghasilkan energi cukup besar,” ujar Ridwan di Pekanbaru, Riau, kemarin.

Politisi Partai Golkar itu mengakui, salah satu penyebab ‘tidak teralirinya’ Riau adalah banyaknya parit di provinsi tersebut. Namun, kata dia, persoalan tersebut bukan tanpa solusi. PLN dapat menggunakan EBT, seperti energi surya, energi angin, atau panas bumi untuk menyelesaikan persoalan di

daerah-daerah yang tidak bisa dialiri oleh pembangkit.

“Ini tugas pemerintah. Komisi VII DPR akan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih serius menangani masalah ini. Jangan sampai, masyarakat yang ada di Pulau Jawa saja yang bisa menikmati energi. Masyarakat di daerah penghasil (energi) besar, seperti Provinsi Riau, masih ada yang belum menikmati aliran listrik,” sesal Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menyatakan, Komisi VII DPR mendorong PLN melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait pengembangan EBT. Salah satunya, PT PLN dapat bekerja sama dengan dengan

Bumdes untuk mengembangkan EBT di berbagai daerah.

“Bumdes mempunyai anggaran dari Dana Desa. Jika anggaran itu dapat digunakan secara optimal, seluruh masyarakat yang ada di pedesaan bisa menikmati listrik,” tegas pimpinan Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR ini.

Ke depan, sambung dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengatur tentang bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik PT PLN. Komisi VII DPR akan mengawasi jalannya program tersebut, memastikan bantuan pemerintah melalui Kementerian ESDM tepat sasaran. ■ ONI